KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

NOMOR : 73 /KPN.W20-U2/SK.OT1.3/I/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO,

Menimbang :

a. bahwa Program kerja merupakan susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode atau satu tahun dengan mengaju pada Rencana Strategis sejalan dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB;
b. bahwa agar Program kerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan, amaka perlu dilakukan penetapan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 2 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Limboto

Royke Harold Inkiriwang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
NOMOR : 73/KPN.W20-U2/SK.OT1.2/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Negeri Limboto

A. 1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasr Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB

1. Profil Pengadilan, meliputi
   a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
   b. Struktur Organisasi Pengadilan;
   c. Alamat, telpon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan
   d. Daftar nama pejabat dan hakim Pengadilan:
   f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
3. Biaya berperkara di Pengadilan Negeri Limboto
4. Agenda sidang;

A.2. Informasi berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubunagn dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi. Tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberaran terhadap pelayanan informasi;
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi;

A.3 Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
   a. Nama Program dan Kegiatan;
   b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi;
   c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
   d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
   e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dipa(DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya;
2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
3. Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Rencana dan laporan realisasi anggaran dan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

4. Ringkasan daftar aset dan inventaris (laporan BMN);
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

A. 4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
d. Alasan penolakan permohonan informasi;

B. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat di Akses oleh Publik

Pengadilan Negeri Limboto mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakan setiap saat;

B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotocopy atau naskah elektronik bukan salinan resmi);
2. Informasi dalam Buku Register Perkara;
3. Data statistik perkara antar lain : jumlah dan jenis perkara
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
5. Laporan penggunaan biaya perkara;

B.2. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

1. Surat Keputusan dan Instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB;

B.3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
2. Profil Hakim dan Pegawai;
3. Data statistik kepegawaian;
4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
5. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

C. Informasi yang di kecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setalah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
   a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain Intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-unang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
a. Informasi dalam proses musyawarah hakim;
b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
c. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim dan pegawai
d. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihal-pihak tertentu dalam putusan atas penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 2 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Limboto

Royke Harold Inkiriwang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
NOMOR : 73/KPN.W20-U2/SK.OT1.2/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

No	Nama Informasi	Pejabat atau Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi arsip
1	Profil Pengadilan	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
2	Prosedur Beracara	Panmud Hukum, Panmud Pidana, Panmud Perdata	Panmud Hukum, Panmud Pidana, Panmud Perdata	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
3	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara	Panmud Perdata, Panmud Hukum	Panmud Perdata, Panmud Hukum	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
4	Agenda Sidang	Panmud Pidana, Panmud Perdata	Panmud Pidana, Panmud Perdata	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
5	Hak para Pihak yang berhubungan dengan Peradilan	Panmud Pidana, Panmud Perdata	Panmud Pidana, Panmud Perdata	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
6	Tata Cara Pengaduan	Panmud Hukum	Panmud Hukum	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
7	Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi	Panmud Hukum	Panmud Hukum	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
8	Biaya perolehan salinan informasi	Panmud Hukum	Panmud Hukum	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
10	Laporan Keuangan	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
11	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
12	Laporan akses informasi	Panmud Hukum	Panmud Hukum	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
13	Informasi tentang penerimaan pegawai	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
14	Kebijakan Mahkamah Agung	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
15	Informasi yang mengganggu pelayanan publik	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
16	Informasi tentang perkara	Panmud Hukum, Panmud Pidana, Panmud Perdata	Panmud Hukum, Panmud Pidana, Panmud Perdata	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun
17	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan	02-01-2026 PN Limboto	Elektronik atau cetak	1Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.